

Efek Jokowi: Peringatan Penting dari Survei Eksperimental

(Adinda Tenriangke Muchtar, Arfianto Purbolaksono – The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research)

<http://www.shnews.co/detile-28182-gelombang-efek-jokowi.html>

Pada 10-20 Oktober 2013, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dan Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) melakukan survei opini publik dengan desain eksperimental. Survei nasional ini dilakukan untuk mengetahui efek pencapresan Joko Widodo (Jokowi) pada elektabilitas partai politik (parpol). Survei eksperimental yang didanai oleh Harian Sinar Harapan ini merupakan survei dengan metode yang relatif baru penerapannya dalam survei opini publik di Indonesia.

Dalam desain eksperimental, survei yang melibatkan 1.200 responden yang merupakan Warga Negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum ketika survei dilakukan ini dibagi dalam tiga kelompok sampel, yang masing-masing dipilih secara random. Dengan demikian, masing-masing kelompok sampel terdiri dari 400 responden. Dalam hal ini, 400 responden untuk pertanyaan pertama (*Non-treatment* atau Kontrol); 400 responden untuk pertanyaan kedua (*Treatment 1*), dan sisanya untuk pertanyaan ketiga (*Treatment 2*).

Metode eksperimental pada dasarnya menggabungkan antara metode penelitian laboratorium dan survei. Metode ini sengaja diterapkan untuk mengetahui efek Jokowi terhadap pilihan partai dengan jelas, dimana Jokowi menjadi sebab, dan bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas partai. (Lihat artikel Deni Irvani mengenai Survei Eksperimental). Selama ini, metode survei konvensional dengan metode yang standar tidak dapat menjawab secara jelas hubungan sebab akibat dari hasil surveinya. Hal ini pulalah yang mendorong TII dan INDIKATOR untuk menerapkan metode eksperimental dalam survei ini.

Menarik untuk mengetahui seberapa signifikan efek Jokowi terhadap pilihan partai, terutama dengan cara pembuktian secara ilmiah dengan menerapkan kaidah eksperimental dalam survei opini publik ini. Jokowi Mujani dan Liddle (2007) menyatakan bahwa elektabilitas calon presiden (capres) dari tokoh parpol merupakan salah satu faktor yang sangat banyak mempengaruhi elektabilitas parpol terkait dalam ajang pemilihan umum. Hal ini juga dapat dilihat secara jelas dan valid dari hasil survei opini publik eksperimental ini.

Apalagi selama ini, dari berbagai hasil survei opini publik yang ada nama Jokowi masih menempati peringkat teratas dengan perolehan suara yang cenderung jauh meninggalkan kandidat-kandidat kuat dan potensial lainnya yang sudah beredar namanya di publik. Bahkan nama Jokowi mendominasi posisi puncak hasil survei capres meskipun penetapan capres 2014 masih belum final. Terlepas dari maraknya hasil survei opini publik yang menunjukkan tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi, hingga saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum mau memberikan kepastian terkait capres dari PDIP dan menyerahkan hal ini pada kebijakan Megawati selaku Ketua Umum PDIP, serta memfokuskan parpol pada upaya pemenangan di Pemilu Legislatif tahun 2014 mendatang.

Hal tersebut juga beralasan, karena bagaimanapun, merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dikatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Di sisi lain, beberapa hasil survei opini publik tentang elektabilitas capres juga telah menunjukkan Jokowi masih menduduki posisi paling kuat dan teratas dalam bursa capres 2014 siapapun nama-nama kandidat yang beredar dan dimasukkan dalam daftar pertanyaan di survei-survei terkait. Berikut beberapa di antara hasil survei terkini tentang elektabilitas capres yang telah dirilis oleh beberapa lembaga survei di Indonesia.

Pada bulan September 2013 Indonesia Research Center (IRC) menempatkan Jokowi dengan tingkat keterpilihan sebesar 36,2 persen. Sementara Wiranto dan Prabowo Subianto masih berebut menduduki peringkat kedua sebagai calon yang paling banyak dipilih untuk menjadi presiden Indonesia 2014. Di bulan yang sama, hasil survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) menempatkan Jokowi sebesar 19,6 persen jika Pilpres dilaksanakan saat survei dilakukan. Di urutan selanjutnya ada Wiranto (18,5%); Prabowo Subianto (15,4%); Jusuf Kalla (7,6%); Aburizal Bakrie (7,3%), dan Megawati (6,1%). Berikutnya, Dahlan Iskan (3,4%); Rhoma Irama (3,4%); Mahfud Md. (3,3%), Hatta Rajasa (2,5%), dan Surya Paloh (2,4%). Tokoh lainnya 1,3 persen. Sebanyak 9,2 persen responden mengaku belum punya pilihan. Sementara itu, hasil survei Political Weather Station (PWS) pada bulan Oktober 2013 menyebut Jokowi sebagai capres alternatif paling potensial. Jokowi mendapatkan dukungan sebesar 70,1 persen. Disusul oleh Priyo Budi Santoso (39,3%) dan Marzuki Alie (33,7%).

Temuan-temuan dari survei yang telah ada tersebut juga diperkuat dengan jelas lewat survei eksperimental TII dan INDIKATOR. Survei eksperimental TII dan INDIKATOR membuktikan secara jelas, kuat, valid dan ilmiah bahwa pencapresan Jokowi oleh PDIP memiliki dampak positif dan sangat signifikan bagi peningkatan elektabilitas PDIP jika pemilihan anggota DPR dilakukan saat eksperimen dilakukan.

Pertama, tanpa pencapresan Jokowi oleh PDIP, elektabilitas partai ini saat survei dilakukan sekitar 22%. *Kedua*, dengan *treatment* jika Jokowi dicapreskan oleh PDIP, elektabilitas partai ini melonjak hampir dua kali lipat, menjadi 38%. *Ketiga*, dengan *treatment* jika Jokowi tidak dicapreskan oleh PDIP, elektabilitas PDIP mengalami penurunan sekitar 14%. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang temuan survei eksperimental tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tiga kelompok sampel diberikan pertanyaan terpisah dan berbeda terkait efek Jokowi. Perlu dicatat bahwa proporsi dan profil responden dalam masing-masing kelompok ini sama. Misalnya, 50% laki-laki dan 50% perempuan, dan sebagainya. Sementara, untuk margin of error (MoE) untuk 400 responden yang terlibat dalam masing-masing kelompok ini kurang lebih 5%.

Kelompok sampel yang menjawab pertanyaan pertama yang sifatnya *non-treatment*/kontrol (tanpa memasukkan nama Jokowi dalam pertanyaan), "Bila pemilihan anggota DPR sekarang, partai atau calon dari partai mana yang dipilih", menunjukkan bahwa 21,6% memilih PDIP; Golkar (17,5%); Demokrat

(9,2%); Gerindra (9,1%); PPP (4,7%); PKB (4,5%); Hanura (4,1%); Nasdem (3,7%); PKS (3,1%); PAN (1,2%); PBB (0,9%); PKPI (0); dan yang belum tahu pilihannya (20,3%).

Di sisi lain, yang menarik dengan metode ekperimental ini, di kelompok sampel yang menjawab pertanyaan kedua, dimana diberikan *Treatment 1* lewat pertanyaan “Jika Jokowi dicalonkan sebagai Presiden oleh PDIP, maka partai atau calon dari partai mana yang dipilih”, menunjukkan lonjakan yang signifikan terhadap perolehan suara PDIP dari 21,6% lewat pertanyaan non-treatment/kontrol, hingga 37,8% (hampir dua kali lipat lonjakan elektabilitasnya) ketika responden diberikan pertanyaan dengan *Treatment 1*.

Dimasukkannya nama Jokowi sebagai *Treatment 1*, dimana jika Jokowi dicalonkan sebagai capres dari PDIP lebih jauh juga mempengaruhi elektabilitas partai lain, dimana dimasukkannya Jokowi dalam bursa capres ikut “menghisap” suara pemilih dari partai lain. Berikut persentase elektabilitas partai lain berdasarkan hasil survei terhadap kelompok responden yang menjawab pertanyaan survei TII dan INDIKATOR dengan *Treatment 1*: Golkar (14,6%); Gerindra (6,6%); Demokrat (5,4%); PPP (3,6%); Hanura (3,5%); PAN (2,5%); PKB (2,5%); Nasdem (1,4%); PKS (0,6%); PBB (0,3%); PKPI (0), dan yang belum tahun (21,2%).

Lebih jauh, efek Jokowi juga dapat dilihat dengan jelas dari temuan hasil survei ekperimental di kelompok sampel yang menjawab pertanyaan dengan *Treatment 2*, dimana kondisinya adalah jika PDIP tidak mencalonkan Jokowi sebagai capres. PDIP mengalami penurunan elektabilitas yang cukup berarti menjadi 14,4% dibandingkan respon terhadap pertanyaan *non-treatment* dan *Treatment 1* dengan elektabilitas PDIP masing-masing 21,6% dan 37,8%.

Bahkan, kondisi dengan pertanyaan *Treatment 2* tersebut juga menunjukkan bahwa jika PDIP tidak mencalonkan Jokowi sebagai capres, maka partai lain yang ‘diuntungkan’ dari *swing voters* dan/atau ‘hukuman’ dari pemilih terhadap PDIP yang tidak mencalonkan Jokowi, adalah Golkar (21,8%) dan Gerindra (11,1%). Sementara Demokrat (8,2%); Hanura (6%); PPP (3,5%); PKB (5,8%); Nasdem (3,9%); PKS (2,7%); PAN (1,1%); PBB (0,3%); PKPI (0,7%), dan yang belum tahu (20,5%).

Dalam hal ini, perlu dicatat, bahwa temuan survei ekperimental ini bukan merupakan prediksi terhadap kemenangan partai dalam Pemilihan Legislatif mendatang. Temuan survei ekperimental TII dan INDIKATOR ini untuk mengetahui dan membuktikan secara ilmiah signifikansi efek Jokowi terhadap elektabilitas partai, baik PDIP maupun partai-partai lainnya berdasarkan pada jawaban responden pada saat survei dilakukan, dengan catatan bahwa pemilu dilakukan saat survei dilakukan.

Penjelasan lebih komprehensif mengenai konteks dan jawaban, serta pandangan responden atau pihak terkait lainnya, serta pemahaman tentang efek Jokowi sendiri harus dilengkapi lewat penelitian kualitatif. Misalnya lewat studi literatur, wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan sebagainya yang melibatkan sumber data acuan yang dapat diandalkan dan narasumber yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian kualitatif juga sangat penting dan dibutuhkan, misalnya untuk memahami lebih lanjut mengapa responden survei masih cenderung menyukai dan memilih Jokowi, sementara masalah banjir,

kemacetan dan sebagainya masih belum dituntaskan di Jakarta. Tentu akan sangat banyak faktor yang mempengaruhi preferensi dan perilaku pemilih yang dapat diperkaya dan diperdalam lewat penelitian kualitatif, terutama untuk menjawab kesenjangan antara asumsi atau teori yang ideal dengan temuan di lapangan.

Lebih jauh, temuan survei eksperimental TII dan INDIKATOR juga menunjukkan dalam Pemilu Legislatif pengaruh pencapresan Jokowi terutama sangat terlihat terhadap elektabilitas Partai Golkar, apalagi jika pencapresan Jokowi oleh PDIP sebagai keputusan politik partai diketahui oleh pemilih nasional. Selain itu, perlu dicatat bahwa untuk mengetahui efek pencapresan Jokowi oleh PDIP terhadap partai lain secara signifikan, maka perolehan suara partai-partai itu dalam survei setidaknya harus 5% atau lebih atau di atas rata-rata MoE; atau MoE-nya diperkecil menjadi misalnya 1%, namun hal ini akan membutuhkan sampel dan biaya yang sangat besar.

Temuan survei eksperimental ini seharusnya memberikan peringatan penting yang mendesak tidak hanya untuk PDIP, namun juga partai-partai lain, terutama melihat dampak dari efek pencapresan Jokowi tersebut. Terlepas dari signifikannya efek pencapresan Jokowi terhadap elektabilitas partai, dan bukan sebaliknya, yang dibuktikan oleh survei eksperimental TII dan INDIKATOR ini, kembali dalam realita politiknya, keputusan mengenai pencapresan Jokowi akan kembali ke PDIP sendiri, terutama kepada Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

Lebih jauh, temuan survei TII dan INDIKATOR juga memberi catatan bagi PDIP dan partai-partai lainnya, bahwa masih ada sekitar 20% responden survei yang menyatakan belum tahu partai yang akan dipilih jika pemilihan anggota DPR dilakukan saat survei dilakukan. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk bergiat dalam rangka memelihara basis konstituen yang ada maupun mendulang suara pendukung dari konstituen baru, khususnya para pemilih yang masih belum menentukan pilihan partainya. Kerja keras itu tentu saja butuh lebih dari sekedar mesin partai, namun juga segenap jajarannya, terutama dari pemimpin, pengurus, serta kandidat dan kader, serta simpatisan dan juga konstituen partai politik yang bersangkutan.

Di sisi lain, terkait pencapresan Jokowi oleh PDIP, terutama keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDIP, keputusan politik tentu membutuhkan banyak pertimbangan sebelum diejawantahkan menjadi aksi politik yang nyata dan pragmatis, terutama ketika berhubungan dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan. Dalam hal ini, survei opini publik yang dilakukan sesuai kaidah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dan idealnya juga mendidik, telah menjadi salah satu acuan bagi para elit politik untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya di papan kompetisi pemilu mendatang.

Dan merujuk kembali ke hasil survei eksperimental TII dan INDIKATOR tentang efek positif dan signifikan pencapresan Jokowi terhadap elektabilitas PDIP dan realita politik yang ada, maka realisasi dan konsistensinya dalam percaturan politik akan menunggu keputusan dari Megawati.

Peringatan penting itu sudah dibuktikan dalam survei eksperimental ini, namun sepenuhnya bola panas jika tidak dadu strategis utama ada di tangan Megawati. Dengan segala pertimbangan politik yang ada dan posisinya di PDIP selama ini, Megawati jelas menjadi kunci politik paling penting dan menentukan di perhelatan 2014 nanti.
